



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 106 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN PENOMORAN IZIN DAN NON IZIN, KODE IZIN DAN NON IZIN,
KODE WILAYAH IZIN DAN NON IZIN, DAN KLASIFIKASI ARSIP SECARA MANUAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

- Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu maka Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Nomor 26 Tahun 2016 perlu disempurnakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan dalam rangka tertib administrasi penomoran izin dan non izin, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Penetapan Penomoran Izin dan Non Izin, Kode Izin dan Non Izin, Kode Wilayah Izin dan Non Izin, dan Klasifikasi Arsip Secara Manual;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas;
11. Peraturan Gubernur Nomor 281 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta;

12. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Keputusan Gubernur Nomor 352 Tahun 2004 tentang Klasifikasi dan Tata Cara Penyimpanan Arsip Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG PENETAPAN PENOMORAN IZIN DAN NON IZIN, KODE IZIN DAN NON IZIN, KODE WILAYAH IZIN DAN NON IZIN, DAN KODE KLASIFIKASI ARSIP SECARA MANUAL.
- KESATU** : Menetapkan Penomoran Izin dan Non Izin, Kode Izin dan Non Izin, Kode Wilayah Izin dan Non Izin, dan Kode Klasifikasi Arsip Secara Manual.
- KEDUA** : Penomoran izin dan non izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan secara manual oleh petugas administratif DPMPTSP, UP PTSP Kota Administrasi, UP PTSP Kabupaten Administrasi, UP PTSP Kecamatan dan UP PTSP Kelurahan.
- KETIGA** : Penomoran izin dan non izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun berdasarkan bidang perizinan dan non perizinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Penomoran izin dan non izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai dengan angka 1 (satu) dan seterusnya dari setiap jenis izin dan non izin yang diterbitkan pada masing-masing Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, UP PTSP Kota Administrasi, UP PTSP Kabupaten Administrasi, UP PTSP Kecamatan, dan UP PTSP Kelurahan.
- KELIMA** : Kode izin dan non izin serta kode klasifikasi arsip setiap jenis izin dan non izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEENAM** : Dalam perpanjangan/daftar ulang, perluasan, balik nama, penggantian/salinan, pemecahan, legalisir, perubahan dan pembatalan/pencabutan/penutupan izin dan non izin, penomoran diawali dengan kode izin dan non izin kemudian diikuti dengan kode berikut :
- | | |
|------------------------------------|------|
| a. perpanjangan/daftar ulang | .1 ; |
| b. perluasan | .2 ; |
| c. balik nama | .3 ; |
| d. penggantian/salinan | .4 ; |
| e. pemecahan | .5 ; |
| f. legalisir | .6 ; |
| g. perubahan | .7 ; |
| h. pembatalan/pencabutan/penutupan | .8 . |
- KETUJUH** : Penomoran izin dan non izin yang belum terakomodir dalam Diktum KELIMA dan Diktum KEENAM akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta.
- KEDELAPAN** : Kode wilayah izin dan non izin pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, UP PTSP Kota Administrasi, UP PTSP Kabupaten Administrasi, UP PTSP Kecamatan, dan UP PTSP Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

- KESEMBILAN** : Contoh penomoran izin dan non izin dan contoh perpanjangan izin dan non izin sebagaimana tercantum dalam lampiran IV dan Lampiran V Keputusan ini.
- KESEPULUH** : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Nomor 26 Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEBELAS** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal tanggal 1 Agustus 2017.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal26....JULI..... 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Tembusan

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal
 dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
 Nomor : 106 TAHUN 2017
 Tanggal : 26 JULI 2017

No.	Bidang Perizinan/Non Perizinan	Kode Bidang Perizinan/Non Perizinan
1	Pendidikan	A
2	Kesehatan	B
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	C
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	D
5	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	E
6	Sosial	F
7	Tenaga kerja	G
8	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	H
9	Pangan	I
10	Pertanahan yang menjadi Kewenangan Daerah	J
11	Lingkungan Hidup	K
12	Pemberdayaan Masyarakat	L
13	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	M
14	Perhubungan	N
15	Komunikasi dan Informatika	O
16	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	P
17	Penanaman Modal	Q
18	Kepemudaan dan Olah Raga	R
19	Statistik	S
20	Persandian	T
21	Kebudayaan	U
22	Perpustakaan	V
23	Kearsipan	W
24	Kelautan dan Perikanan	X
25	Pariwisata	Y
26	Pertanian	Z
27	Kehutanan	AA
28	Energi dan Sumber Daya Mineral	AB
29	Perdagangan	AC
30	Perindustrian	AD
31	Transmigrasi	AE
32	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	AF
33	Pelayanan Administrasi	AG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU
 PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



EDSY JUNAEDI

NIP 19761301995111001

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal
 dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
 Nomor : 106 TAHUN 2017
 Tanggal : 26 Juli 2017

BIDANG	NO	JENIS IZIN/NON IZIN	KODE IZIN/ NON IZIN	KODE KLASIFIKASI ARSIP	KLASIFIKASI ARSIP
A Pendidikan	1	Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak	A.1	-1.851.192	Perizinan Pendidikan Pra Sekolah
	2	Izin Pendirian Sekolah (SD/SMP/SMA/SMK)	A.2	-1.851	Perizinan Pendidikan
	3	Rekomendasi Satuan Pendidikan Kejasamaan (TK/SD/SMP/SMA/SMK)	A.3	-1.851	Perizinan Pendidikan
	4	Izin Penyelenggaraan Pendidikan Khusus	A.4	-1.851.232	Perizinan Pendidikan Luar Biasa
	5	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal			
		- Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan	A.5a	-1.851.332	Perizinan Pendidikan Luar Sekolah
		- Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Mengajar	A.5b	-1.851.332	Perizinan Pendidikan Luar Sekolah
		- Izin Operasional Lembaga Pendidikan Informal	A.5c	-1.851.332	Perizinan Pendidikan Luar Sekolah
	6	Izin Pendirian Satuan PAUD	A.6	-1.851.192	Perizinan Pendidikan Pra Sekolah
B Kesehatan	1	Izin Operasional Perusahaan Pengendalian Hama (Pest Control)	B.1	-1.779.3	Perizinan Bidang Kesehatan
	2	Izin Penyelenggaraan Optikal	B.2	-1.779.3	Perizinan Bidang Kesehatan
	3	Izin Operasional RS	B.3	-1.779.3	Perizinan Bidang Kesehatan
	4	Izin Pendirian RS	B.4	-1.779.3	Perizinan Bidang Kesehatan
	5	Izin Pendirian Penyelempgaraan Bank Sel Puncak Darah Tali Pusat	B.5	-1.779.3	Perizinan Bidang Kesehatan
	6	Izin Klinik (Utama dan Pratama)	B.6	-1.779.3	Perizinan Bidang Kesehatan
	7	Izin Laboratorium Klinik (Madya dan Pratama)	B.7	-1.779.3	Perizinan Bidang Kesehatan
	8	Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional	B.8	-1.779.3	Perizinan Bidang Kesehatan
	9	Izin Penyelenggaraan Unit Pelayanan Dialisis di Rumah Sakit	B.9	-1.779.3	Perizinan Bidang Kesehatan
	10	Izin Penyelenggaraan Klinik Pelayanan Hemodialisis	B.10	-1.779.3	Perizinan Bidang Kesehatan
	11	Izin Toko Alat Kesehatan	B.11	-1.779.3	Perizinan Bidang Kesehatan
	12	Izin Usaha Obat Tradisional (Kecil dan mikro)	B.12	-1.779.3	Perizinan Bidang Kesehatan
	13	Izin Apotek	B.13	-1.779.3	Perizinan Bidang Kesehatan
	14	Izin Pedagang Eceran Obat	B.14	-1.779.3	Perizinan Bidang Kesehatan
	15	Surat Izin Praktik Dokter			
		- Surat Izin Praktik Dokter Umum/Dokter Gigi	B.15a	-1.779.3	Perizinan Bidang Kesehatan
		- Surat Izin Praktik Dokter Spesialis/Gigi Spesialis	B.15b	-1.779.3	Perizinan Bidang Kesehatan

BIDANG	NO	JENIS IZIN/NON IZIN	KODE IZIN/ NON IZIN	KODE KLASIFIKASI ARSIP	KLASIFIKASI ARSIP
	16	Surat Izin Praktik Perawat	B.16	-1.779.3	Perizinan Bidang Kesehatan
	17	Surat Izin Praktik Bidan	B.17	-1.779.3	Perizinan Bidang Kesehatan
	18	Surat Izin Praktik Teknis Kefarmasian (di Fasilitas Kefarmasan)	B.18	-1.779.3	Perizinan Bidang Kesehatan
	19	Surat Izin Praktik Apoteker	B.19	-1.779.3	Perizinan Bidang Kesehatan
	20	Surat Izin Kerja Refrakjonsis Optisien	B.20	-1.779.3	Perizinan Bidang Kesehatan
	21	Surat Izin Kerja Fisioterapis	B.21	-1.779.3	Perizinan Bidang Kesehatan
	22	Surat Izin Kerja Terapi Wicara	B.22	-1.779.3	Perizinan Bidang Kesehatan
	23	Surat Izin Kerja Radiografer	B.23	-1.779.3	Perizinan Bidang Kesehatan
	24	Surat Izin Praktik Penata Anestesi	B.24	-1.779.3	Perizinan Bidang Kesehatan
	25	Surat Izin Praktik Perawat Gigi	B.25	-1.779.3	Perizinan Bidang Kesehatan
	26	Surat Izin Kerja Ortopis Prostetis	B.26	-1.779.3	Perizinan Bidang Kesehatan
	27	Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik	B.27	-1.779.3	Perizinan Bidang Kesehatan
	28	Surat Izin Kerja Tenaga Sanitariaan	B.28	-1.779.3	Perizinan Bidang Kesehatan
	29	Surat Izin Praktik Ahli Kesehatan Masyarakat	B.29	-1.779.3	Perizinan Bidang Kesehatan
	30	Surat Izin Praktik Tenaga Gizi	B.30	-1.779.3	Perizinan Bidang Kesehatan
	31	Surat Izin Kerja Teknisi Gigi	B.31	-1.779.3	Perizinan Bidang Kesehatan
	32	Surat Izin Praktik Elektromedis	B.32	-1.779.3	Perizinan Bidang Kesehatan
	33	Surat Izin Kerja Perekam Medis	B.33	-1.779.3	Perizinan Bidang Kesehatan
	34	Surat Izin Kerja Optometris	B.34	-1.779.3	Perizinan Bidang Kesehatan
	35	Surat Izin Praktik Okupasi Terapi	B.35	-1.779.3	Perizinan Bidang Kesehatan
	36	Surat Izin Praktik Fisika Medik	B.36	-1.779.3	Perizinan Bidang Kesehatan
	37	Izin Puskesmas (Kecamatan/Kelurahan)	B.37	-1.779.3	Perizinan Bidang Kesehatan
	38	Izin Panti Sehat (Pengobatan Tradisional / Pijat Tuna Netra)	B.38	-1.779.3	Perizinan Bidang Kesehatan
	39	Izin Sarana Pelayanan Kesehatan Tradisional	B.39	-1.779.3	Perizinan Bidang Kesehatan
	40	Surat Izin Ahli Kecantikan	B.40	-1.779.3	Perizinan Bidang Kesehatan
	41	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (Praktik Perorangan/Fasilitas/Pelayanan Kesehatan)	B.41	-1.779.3	Perizinan Bidang Kesehatan
	42	Rekomendasi Izin Operasional Rumah Sakit Kelas A	B.42	-1.779.3	Perizinan Bidang Kesehatan
	43	Rekomendasi Izin Pendirian Rumah Sakit Kelas A	B.43	-1.779.3	Perizinan Bidang Kesehatan
	44	Rekomendasi Laboratorium Klinik Umum Tipe Utama	B.44	-1.779.3	Perizinan Bidang Kesehatan
	45	Rekomendasi Industri Farmasi	B.45	-1.779.3	Perizinan Bidang Kesehatan
	46	Rekomendasi Industri Obat Tradisional	B.46	-1.779.3	Perizinan Bidang Kesehatan
	47	Rekomendasi Produksi Kosmetik	B.47	-1.779.3	Perizinan Bidang Kesehatan
	48	Rekomendasi Produksi Alat Kesehatan	B.48	-1.779.3	Perizinan Bidang Kesehatan
	49	Izin Penambahan Jenis Produksi Alat Kesehatan Rumah Tangga	B.49	-1.779.3	Perizinan Bidang Kesehatan
	50	Rekomendasi Produksi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	B.50	-1.779.3	Perizinan Bidang Kesehatan
	51	Rekomendasi Pedagang Besar Farmasi	B.51	-1.779.3	Perizinan Bidang Kesehatan

BIDANG	NO	JENIS IZIN/NON IZIN	KODE IZIN/ NON IZIN	KODE KLASIFIKASI ARSIP	KLASIFIKASI ARSIP
	52	Rekomendasi Pedagang Besar Farmasi yang Mendistribusikan Psikotropika	B.52	-1.779.3	Perizinan Bidang Kesehatan
	53	Izin Cabang Pedagang Besar Farmasi (Pengakuan Pedagang Besar Farmasi Cabang)	B.53	-1.779.3	Perizinan Bidang Kesehatan
	54	Rekomendasi Penyalur Alat Kesehatan	B.54	-1.779.3	Perizinan Bidang Kesehatan
	55	Izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan	B.55	-1.779.3	Perizinan Bidang Kesehatan
	56	Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	B.56	-1.779.3	Perizinan Bidang Kesehatan
	57	Sertifikat Laik Sehat			
		- Sertifikat Laik Sehat Penyehatan Makanan Bagi Usaha Jasa Boga	B.57a	-1.779.3	Perizinan Bidang Kesehatan
		- Sertifikat Laik Sehat Usaha Hotel, Restoran dan Rumah Makan	B.57b	-1.779.3	Perizinan Bidang Kesehatan
		- Surat Keterangan Laik Sehat Usaha Pangan Rumah Tangga	B.57c	-1.779.3	Perizinan Bidang Kesehatan
		- Sertifikat Laik Sehat Usaha Depo Air Minum	B.57d	-1.779.3	Perizinan Bidang Kesehatan
	58	Izin Ambulans	B.58	-1.779.3	Perizinan Bidang Kesehatan
	59	Izin Tukang Gigi	B.59	-1.779.3	Perizinan Bidang Kesehatan
	60	Surat Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler	B.60	-1.779.3	Perizinan Bidang Kesehatan
	61	Surat Izin Praktik Teknisi Pelayanan Darah	B.61	-1.779.3	Perizinan Bidang Kesehatan
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	Izin Pelaksanaan Storing Jaringan Utilitas	C.1	-1.798	Perizinan Bidang Pekerjaan Umum
	2	Izin Pelaksanaan Penempatan Bangunan Pelengkap	C.2	-1.798	Perizinan Bidang Pekerjaan Umum
	3	Izin Pelaksanaan Penempatan Jaringan Utilitas	C.3	-1.798	Perizinan Bidang Pekerjaan Umum
	4	Izin Membangun Prasarana	C.4	-1.798	Perizinan Bidang Pekerjaan Umum
	5	Izin Pemilik Lantai Bangunan	C.5	-1.798	Perizinan Bidang Pekerjaan Umum
	6	Izin Pemanfaatan Air Permuakaan	C.6	-1.798	Perizinan Bidang Pekerjaan Umum
	7	Izin Usaha Pengelolaan Sampah			
		- Izin Usaha Pelayaran Angkutan di Bidang Kebersihan	C.7a	-1.799.5	Perizinan Bidang Kebersihan
		- Izin Usaha Pemusnahan/Pemanfaatan Sampah dan Air kotor	C.7b	-1.799.5	Perizinan Bidang Kebersihan
		- Izin Usaha Pengelolaan Sampah	C.7c	-1.799.5	Perizinan Bidang Kebersihan
	8	Izin Pemakaian Lokasi Taman dan Jalur Hijau			
		- Izin Pemakaian Lokasi Taman dan Jalur Hijau untuk Shooting Film, Bazar, Perlombaan, dan Kegiatan Lain	C.8a	-1.795.25	Perizinan Bidang Pertamanan dan Keindahan Kota
		- Izin Pemakaian Lokasi Taman dan Jalur Hijau Untuk Perkembahan	C.8b	-1.795.25	Perizinan Bidang Pertamanan dan Keindahan Kota

BIDANG	NO	JENIS IZIN/NON IZIN	KODE IZIN/ NON IZIN	KODE KLASIFIKASI ARSIP	KLASIFIKASI ARSIP
		- Izin Pemakaian Lokasi Taman dan Jalur Hijau Untuk Bedeng Proyek (Direksi Keet), Material dan Sejenisnya - Izin Pemakaian Lokasi Taman Pemakaman Untuk Shooting Film	C.8c C.8d	-1.795.25 -1.795.25	Perizinan Bidang Pertamanan dan Keindahan Kota Perizinan Bidang Pertamanan dan Keindahan Kota
9	Izin Penebangan Pohon Pelindung		C.9	-1.795.25	Perizinan Bidang Pertamanan dan Keindahan Kota
10	Izin Penggunaan Bangunan di Lokasi Taman dan Jalur Hijau		C.10	-1.795.25	Perizinan Bidang Pertamanan dan Keindahan Kota
11	Izin Pemakaian Lokasi Kebun Bibit Dinas Kehutanan Izin Mengangkut Jenazah Ke Luar Negeri/Ke Luar Wilayah Provinsi DKI Jakarta		C.11	-1.795.25	Perizinan Bidang Pertamanan dan Keindahan Kota
12	Izin Tahan Jenazah		C.12	-1.795.25	Perizinan Bidang Pertamanan dan Keindahan Kota
13	Izin Pengabuan Jenazah/Kerangka		C.13	-1.795.25	Perizinan Bidang Pertamanan dan Keindahan Kota
14	Izin Usaha Jasa Pelayanan Pemakaman		C.14	-1.795.25	Perizinan Bidang Pertamanan dan Keindahan Kota
15	Izin Usaha Angkutan Jenazah		C.15	-1.795.25	Perizinan Bidang Pertamanan dan Keindahan Kota
16	Izin Usaha Angkutan Jenazah		C.16	-1.795.25	Perizinan Bidang Pertamanan dan Keindahan Kota
17	Izin Usaha/Yayasan Rumah Abu		C.17	-1.795.25	Perizinan Bidang Pertamanan dan Keindahan Kota
18	Izin Usaha/Yayasan Rumah Duka		C.18	-1.795.25	Perizinan Bidang Pertamanan dan Keindahan Kota
19	Izin Usaha Krematorium (Pengabuan)		C.19	-1.795.25	Perizinan Bidang Pertamanan dan Keindahan Kota
20	Izin Penggunaan Tanah Makam (Makam Baru/Perpanjangan/Tumpangan)		C.20	-1.795.25	Perizinan Bidang Pertamanan dan Keindahan Kota
21	Izin Penggalian dan Pemindahan Jenazah/Kerangka Jenazah		C.21	-1.795.25	Perizinan Bidang Pertamanan dan Keindahan Kota
22	Peta Situasi Ukur/Pengukuran Lahan		C.22	-1.711.53	Pelayanan Tata Ruang
23	Ketetapan Rencana Kota				
	- Ketetapan Rencana Kota: Besar Luas tanah \geq 5000 m ² , untuk semua jenis bangunan rumah tinggal dan non-rumah tinggal		C.23a	-1.711.53	Pelayanan Tata Ruang
	- Ketetapan Rencana Kota: Sedang Luas tanah \geq 1000 m ² hingga luas tanah berukuran < 5000 m ² , untuk semua jenis bangunan rumah tinggal dan non-rumah tinggal		C.23b	-1.711.53	Pelayanan Tata Ruang

BIDANG NO	JENIS IZIN/NON IZIN	KODE IZIN/ NON IZIN	KODE KLASIFIKASI ARSIP	KLASIFIKASI ARSIP
	- Ketetapan Rencana Kota: Kecil Luas tanah < 1000 m ² , untuk semua jenis bangunan rumah tinggal dan non-rumah tinggal	C.23c	-1.711.53	Pelayanan Tata Ruang
24	Ketetapan Rencana Kota untuk Konsultasi BKPRD			
	- Ketetapan Rencana Kota : Besar Luas tanah ≥ 5000 m ² , untuk semua jenis bangunan rumah tinggal dan non-rumah tinggal	C.24a	-1.711.53	Pelayanan Tata Ruang
	- Ketetapan Rencana Kota : Sedang Luas tanah ≥ 1000 m ² hingga luas tanah berukuran < 5000 m ² , untuk semua jenis bangunan rumah tinggal dan non-rumah tinggal	C.24b	-1.711.53	Pelayanan Tata Ruang
	- Ketetapan Rencana Kota : Kecil Luas tanah < 1000 m ² , untuk semua jenis bangunan rumah tinggal dan non-rumah tinggal	C.24c	-1.711.53	Pelayanan Tata Ruang
25	Pengesahan Gambar Perencanaan Arsitektur			
	- Pengesahan Gambar Perencanaan Arsitektur Bangunan Non-Rumah Tinggal jumlah lantai > 8	C.25a	-1.785.56	Pembinaan dan Penyuluhan Terhadap Pelaku Pembangunan
	- Pengesahan Gambar Perencanaan Arsitektur Bangunan Non-Rumah Tinggal jumlah lantai ≤ 8	C.25b	-1.785.56	Pembinaan dan Penyuluhan Terhadap Pelaku Pembangunan
26	Cetak Ulang Peta atau Gambar Ketataruan			
	Persetujuan Prinsip Trase Jalan, Jembatan, Saluran, atau Utilitas	C.26	-1.711.53	Pelayanan Tata Ruang
27	Izin Trase Jalan, Jembatan, Saluran, atau Utilitas	C.27	-1.711.53	Pelayanan Tata Ruang
28	Izin Trase Jalan, Jembatan, Saluran, atau Utilitas	C.28	-1.711.53	Pelayanan Tata Ruang
29	Persetujuan Prinsip Pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KLB)	C.29	-1.785.5	Izin dan retribusi Bangunan
30	Izin Penyelemparaan Reklame			
	- Izin Penyelemparaan Reklame: Luas Bidang > 24 m ² , atau memiliki LED, atau berada di Kawasan Kendali Ketat	C.30a	-1.728	Perizinan Bidang Pendapatan Daerah
	- Izin Penyelemparaan Reklame: Luas Bidang < 24 m ² , memiliki TLB BR, atau berada di luar Kawasan Kendali Ketat	C.30b	-1.728	Perizinan Bidang Pendapatan Daerah
	- Izin Penyelemparaan Reklame: Tidak memiliki TLB BR (Tata Letak Bangunan, Bangunan Reklame)	C.30c	-1.728	Perizinan Bidang Pendapatan Daerah
31	Izin Usaha Jasa Konstruksi (Besar/Menengah/Kecil)	C.31	-1.785.56	Pembinaan dan Penyuluhan Terhadap Pelaku Pembangunan
32	Rekomendasi Saluran Kabel Tegangan Tinggi	C.32	-1.711.53	Pelayanan Tata Ruang
33	Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan untuk Usaha Jasa Konstruksi	C.33	-1.785.56	Pembinaan dan Penyuluhan Terhadap Pelaku Pembangunan

BIDANG	NO	JENIS IZIN/NON IZIN	KODE IZIN/ NON IZIN	KODE KLASIFIKASI ARSIP	KLASIFIKASI ARSIP
	34	Tata Letak Bangunan untuk Bangunan Menara	C.34	-1.785.55	Perencanaan Bangunan
	35	Tata Letak Bangunan untuk Bangunan Reklame	C.35	-1.785.55	Perencanaan Bangunan
	36	Izin Usaha Jasa Konsultan	C.36	-1.798	Perizinan Bidang Pekerjaan Umum
	37	Izin Mendirikan Bangunan			
		- Izin Mendirikan Bangunan: Bangunan Non-rumah tinggal jumlah lantai > 8 lantai; IMB Pondasi	C.37a	-1.785.51	Izin IMB
		- Izin Mendirikan Bangunan: Bangunan Non-rumah tinggal jumlah lantai ≤ 8 lantai; Rumah Tinggal Pemugaran Cagar Budaya Golongan A; IMB Reklame; IMB Menara	C.37b	-1.785.51	Izin IMB
		- Izin Mendirikan Bangunan: Bangunan Rumah tinggal luas tanah ≥ 100 m ² , kondisi tanah tidak harus kosong, dan jumlah lantai s.d. 3 lantai termasuk Cluster/Town House; Pemugaran Cagar Budaya Golongan B dan C; IMB Gudang dengan luas tanah ≤ 1500 m ² dan jumlah lantai maksimal 2 Lantai; IMB Non-Rumah Tinggal yang tidak mengubah konstruksi namun mengubah fungsi (Non-Industri)	C.37c	-1.785.51	Izin IMB
		- Izin Mendirikan Bangunan: Bangunan Rumah tinggal luas tanah < 100 m ² , kondisi tanah kosong atau di atasnya terdapat bangunan tua yang akan dibongkar, dan jumlah lantai s.d 2 lantai	C.37d	-1.785.51	Izin IMB
	38	Surat Kelayakan Konstruksi Menara	C.38	-1.819.6	Perizinan di Bidang Angkutan Darat, Laut, Udara, Pos dan Telekomunikasi
	39	Sertifikat Layak Fungsi			
		- Sertifikat Layak Fungsi: Bangunan Non-rumah tinggal jumlah lantai > 8 lantai	C.39a	-1.785.51	Izin Penggunaan Bangunan
		- Sertifikat Layak Fungsi: Bangunan Non-rumah tinggal jumlah lantai ≤ 8 Lantai; Rumah Tinggal Pemugaran Cagar Budaya Golongan A.	C.39b	-1.785.51	Izin Penggunaan Bangunan
		- Sertifikat Layak Fungsi: Bangunan Rumah tinggal luas tanah ≥ 100 m ² dan jumlah lantai s.d 3 lantai termasuk Cluster/Town House, Pemugaran Cagar Budaya Golongan B dan C; Bangunan Gudang luas tanah ≤ 1500 m ² dan jumlah lantai maksimal 2 lantai; Bangunan Non-Rumah tinggal yang tidak mengubah konstruksi namun mengubah fungsi (Non-Industri)	C.39c	-1.785.51	Izin Penggunaan Bangunan
		- Sertifikat Layak Fungsi: Bangunan Rumah tinggal luas tanah < 100 m ² dan jumlah lantai s.d 2 lantai	C.39d	-1.785.51	Izin Penggunaan Bangunan

BIDANG	NO	JENIS IZIN/NON IZIN	KODE IZIN/ NON IZIN	KODE KLASIFIKASI ARSIP	KLASIFIKASI ARSIP
	40	Izin Pelaku Teknis Bangunan	C.40	-1.785.5	Izin dan retribusi Bangunan
	41	Persetujuan Rencana Teknis Bongkar	C.41	-1.785.5	Izin dan retribusi Bangunan
	42	Rekomendasi Loading Test	C.42	-1.785.5	Izin dan retribusi Bangunan
	43	Rekomendasi Zona Menara	C.43	-1.819.6	Perizinan di Bidang Angkutan Darat, Laut, Udara, Pos dan Telekomunikasi
Perumahan D Rakyat dan Kawasan Permukiman	1	Izin Rumah Kost	D.1	-1.796.8	Perizinan Bidang Perumahan
	2	Izin Perumahan	D.2	-1.796.8	Perizinan Bidang Perumahan
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	1	Sertifikat Keselamatan Kebakaran	E.1	-1.784.1	Kebijakan Bidang Bahaya Kebakaran
	2	Rekomendasi Keselamatan Kebakaran	E.2	-1.784.1	Kebijakan Bidang Bahaya Kebakaran
	3	Tanda Daffar Keahlian Keselamatan Kebakaran	E.3	-1.784.1	Kebijakan Bidang Bahaya Kebakaran
	4	Izin Gangguan - Tempat Usaha Berdasarkan Undang- Undang Gangguan	E.4	-1.751.2	Perizinan Bidang Keteriban Umum
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10	Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah	F.10	-1.848	Perizinan di Bidang Kesejahteraan Sosial
G Tenaga Kerja	1	Izin Lembaga Pelatihan Kerja	G.1	-1.837	Perizinan di Bidang Ketenagakerjaan
	2	Izin Lembaga Pelatihan Kerja atau Balai Latihan Kerja Luar Negeri	G.2	-1.837	Perizinan di Bidang Ketenagakerjaan
	3	Izin Tempat Penampungan Calon Tenaga Kerja Indnesia	G.3	-1.837	Perizinan di Bidang Ketenagakerjaan

BIDANG	NO	JENIS IZIN/NON IZIN	KODE IZIN/ NON IZIN	KODE KLASIFIKASI ARSIP	KLASIFIKASI ARSIP
	4	Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh	G.4	-1.837	Perizinan di Bidang Ketenagakerjaan
	5	Pengesahan Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing	G.5	-1.837	Perizinan di Bidang Ketenagakerjaan
	6	Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	G.6	-1.837	Perizinan di Bidang Ketenagakerjaan
	7	Laporan Keberadaan Tenaga Kerja Asing	G.7	-1.837	Perizinan di Bidang Ketenagakerjaan
	8	Izin Operasional Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Dengan Disabilitas	G.8	-1.837	Perizinan di Bidang Ketenagakerjaan
	9	Izin Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta	G.9	-1.837	Perizinan di Bidang Ketenagakerjaan
	10	Izin Operasional Lembaga Penyedia dan Penyalur Pekerja Rumah Tangga	G.10	-1.837	Perizinan di Bidang Ketenagakerjaan
	11	Surat Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta Antar Kerja Lokal	G.11	-1.837	Perizinan di Bidang Ketenagakerjaan
	12	Wajib Lapor Ketenagakerjaan	G.12	-1.837	Perizinan di Bidang Ketenagakerjaan
	13	Persetujuan Pendirian Bursa Kerja Khusus	G.13	-1.837	Perizinan di Bidang Ketenagakerjaan
	14	Kartu Percari Kerja (AK1)	G.14	-1.837	Perizinan di Bidang Ketenagakerjaan
	15	Pengesahan Pemakaian dan Pengolahan Bahan Kimia Berbahaya di Tempat Kerja	G.15	-1.837	Perizinan di Bidang Ketenagakerjaan
H	Pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak				
I	Pangan				
J	Pertanahan yang menjadi kewenangan daerah	1 Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang	J.1	-1.711.32	Hak Atas Tanah
	2 Izin Lokasi		J.2	-1.711.32	Hak Atas Tanah
	3 Rekomendasi Perolehan/Peralihan/Penjaminan Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atau Hak Lainnya di Atas Bidang Tanah Hak Pengelolaan		J.3	-1.711.32	Hak Atas Tanah
	4 Penjaminan Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atau Hak Lainnya Diatas Bidang Tanah Hak Pengejalaan Lahan		J.4	-1.711.32	Hak Atas Tanah
	5 Permohonan Hak Diatas Bidang Tanah Eks Desa atau Tanah Eks Kota Praja		J.5	-1.711.43	Permohonan Hak
K	Lingkungan Hidup	1 Izin Lingkungan - Analisis Mengenai Dampak Lingkungan			

BIDANG	NO	JENIS IZIN/NON IZIN	KODE IZIN/ NON IZIN	KODE KLASIFIKASI ARSIP	KLASIFIKASI ARSIP
		- Izin Lingkungan - Analisis Mengenai Dampak Lingkungan	K.1a	-1.774.15	Amdal dan Perizinan Lingkungan
		- Persetujuan KA ANDAL	K.1b	-1.774.15	Amdal dan Perizinan Lingkungan
		- Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan	K.1c	-1.774.15	Amdal dan Perizinan Lingkungan
2		Izin Lingkungan - Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)	K.2	-1.774.15	Amdal dan Perizinan Lingkungan
	3	Izin Lingkungan - Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan	K.3	-1.774.15	Amdal dan Perizinan Lingkungan
	4	Izin Lingkungan - Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)	K.4	-1.774.15	Amdal dan Perizinan Lingkungan
	5	Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	K.5	-1.774.15	Amdal dan Perizinan Lingkungan
	6	Izin Pengumpul Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Rekomendasi Pengumpul Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Skala Nasional	K.6	-1.774.15	Amdal dan Perizinan Lingkungan
	7	Izin Pembuangan Air Limbah	K.7	-1.774.15	Amdal dan Perizinan Lingkungan
	8	Izin Instalasi Pengolahan Air Limbah	K.8	-1.774.15	Amdal dan Perizinan Lingkungan
	9	Izin Instalasi Penggeboran Air Tanah	K.9	-1.774.15	Amdal dan Perizinan Lingkungan
	10	Izin Penggeboran Air Tanah	K.10	-1.774.15	Amdal dan Perizinan Lingkungan
	11	Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah Sumur Bor	K.11	-1.774.15	Amdal dan Perizinan Lingkungan
	12	Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah Sumur Pantek	K.12	-1.774.15	Amdal dan Perizinan Lingkungan
	13	Izin Kartu Juru Bor	K.13	-1.774.15	Amdal dan Perizinan Lingkungan
	14	Izin Kartu Pengena Instalasi Bor	K.14	-1.774.15	Amdal dan Perizinan Lingkungan
	15	Izin Usaha Pengeboran Air Bawah Tanah	K.15	-1.774.15	Amdal dan Perizinan Lingkungan
	16	Izin Dewatering	K.16	-1.774.15	Amdal dan Perizinan Lingkungan
	17	Surat Perintaan Pengelolaan Lingkungan	K.17	-1.774.15	Amdal dan Perizinan Lingkungan
	18	Izin Operasional Concrete Batching Plant	K.18	-1.774.15	Amdal dan Perizinan Lingkungan
	19	Izin Pemanfaatan Air Baku	K.19	-1.774.15	Amdal dan Perizinan Lingkungan
	20	Izin Pengumpul Limbah Minyak Goreng	K.20	-1.774.15	Amdal dan Perizinan Lingkungan
L		Pemberdayaan Masyarakat			
M		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
N	Perhubungan	1 Izin Kegiatan Penunjang dalam Terminal Izin Penyelegaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek (Baru / Perpanjangan Dalam Wilayah Provinsi DKI Jakarta) 2	N.1 N.2	-1.819.6 -1.819.6	Perizinan di Bidang Angkutan Darat, Laut, Udara, Pos dan Telekomunikasi Perizinan di Bidang Angkutan Darat, Laut, Udara, Pos dan Telekomunikasi

BIDANG	NO	JENIS IZIN/NON IZIN	KODE IZIN/ NON IZIN	KODE KLASIFIKASI ARSIP	KLASIFIKASI ARSIP
	3	Izin Penyelegaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (baru / perpanjangan Dalam Wilayah Provinsi DKI Jakarta)	N.3	-1.819.6	Perizinan di Bidang Angkutan Darat, Laut, Udara, Pos dan Telekomunikasi
	4	Izin Penyelegaraan Angkutan Barang	N.4	-1.819.6	Perizinan di Bidang Angkutan Darat, Laut, Udara, Pos dan Telekomunikasi
	5	Pertimbangan Teknis Angkutan Antar Kota Antar Propinsi	N.5	-1.819.6	Perizinan di Bidang Angkutan Darat, Laut, Udara, Pos dan Telekomunikasi
	6	Pertimbangan Teknis Angkutan Pariwisata	N.6	-1.819.6	Perizinan di Bidang Angkutan Darat, Laut, Udara, Pos dan Telekomunikasi
	7	Penetapan Status, Perubahan Status, Peremajaan dan Baik Nama Kendaraan Angkutan Umum	N.7	-1.819.6	Perizinan di Bidang Angkutan Darat, Laut, Udara, Pos dan Telekomunikasi
	8	Izin Penyelegaraan Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi	N.8	-1.819.6	Perizinan di Bidang Angkutan Darat, Laut, Udara, Pos dan Telekomunikasi
	9	Izin Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Pelabuhan Pengumpulan	N.9	-1.819.6	Perizinan di Bidang Angkutan Darat, Laut, Udara, Pos dan Telekomunikasi
	10	Izin Pemanfaatan Perairan di Luar Pelabuhan	N.10	-1.819.6	Perizinan di Bidang Angkutan Darat, Laut, Udara, Pos dan Telekomunikasi
	11	Izin Pemanfaatan Wilayah Perairan Untuk Kegiatan Industri dan Pemotongan Kapal, Pariwisata, Kepelabuhanan, Floating Repair, Floating Terminal, Floating Storage	N.11	-1.819.6	Perizinan di Bidang Angkutan Darat, Laut, Udara, Pos dan Telekomunikasi
	12	Izin Usaha Angkutan Perairan	N.12	-1.819.6	Perizinan di Bidang Angkutan Darat, Laut, Udara, Pos dan Telekomunikasi
	13	Izin Usaha Bongkar Muat Barang	N.13	-1.819.6	Perizinan di Bidang Angkutan Darat, Laut, Udara, Pos dan Telekomunikasi
	14	Izin Usaha Depo Peti Kemas	N.14	-1.819.6	Perizinan di Bidang Angkutan Darat, Laut, Udara, Pos dan Telekomunikasi
	15	Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi	N.15	-1.819.6	Perizinan di Bidang Angkutan Darat, Laut, Udara, Pos dan Telekomunikasi
	16	Izin Usaha Jasa Tally	N.16	-1.819.6	Perizinan di Bidang Angkutan Darat, Laut, Udara, Pos dan Telekomunikasi
	17	Izin Usaha Pelayaran Rakyat	N.17	-1.819.6	Perizinan di Bidang Angkutan Darat, Laut, Udara, Pos dan Telekomunikasi
	18	Pas Kecil dan Sertifikat Kesempurnaan	N.18	-1.819.6	Perizinan di Bidang Angkutan Darat, Laut, Udara, Pos dan Telekomunikasi
	19	Izin Pool	N.19	-1.819.6	Perizinan di Bidang Angkutan Darat, Laut, Udara, Pos dan Telekomunikasi
	20	Persetujuan Analisa Dampak Lalu Lintas	N.20	-1.819.6	Perizinan di Bidang Angkutan Darat, Laut, Udara, Pos dan Telekomunikasi

BIDANG	NO	JENIS IZIN/NON IZIN	KODE IZIN/ NON IZIN	KODE KLASIFIKASI ARSIP	KLASIFIKASI ARSIP
	21	Izin Penyelenggaraan Perparkiran Di Luar Ruang Milik Jalan	N.21	-1.819.6	Perizinan di Bidang Angkutan Darat, Laut, Udara, Pos dan Telekomunikasi
	22	Izin Angkutan Barang Untuk Melewati Jalan-Jalan Tertentu	N.22	-1.819.6	Perizinan di Bidang Angkutan Darat, Laut, Udara, Pos dan Telekomunikasi
	23	Izin Usaha Angkutan Penyeberangan	N.23	-1.819.6	Perizinan di Bidang Angkutan Darat, Laut, Udara, Pos dan Telekomunikasi
	24	Izin Insidental Angkutan Lebaran	N.24	-1.819.6	Perizinan di Bidang Angkutan Darat, Laut, Udara, Pos dan Telekomunikasi
	25	Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan	N.25	-1.819.6	Perizinan di Bidang Angkutan Darat, Laut, Udara, Pos dan Telekomunikasi
O	Komunikasi dan Informatika				
P	Koperasi, Serta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)	P.1	-1.828.2	Perizinan Usaha Kecil dan Menengah
Q	Penanaman Modal	1 Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri	Q.1	-1.826.41	Perizinan Penanaman Modal Dalam Negeri
		2 Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri	Q.2	-1.826.41	Perizinan Penanaman Modal Dalam Negeri
		3 Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri	Q.3	-1.826.41	Perizinan Penanaman Modal Dalam Negeri
		4 Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri	Q.4	-1.826.41	Perizinan Penanaman Modal Dalam Negeri
		5 Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri	Q.5	-1.826.41	Perizinan Penanaman Modal Dalam Negeri
		6 Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri	Q.6	-1.826.41	Perizinan Penanaman Modal Dalam Negeri
		7 Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri	Q.7	-1.826.41	Perizinan Penanaman Modal Dalam Negeri
		8 Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri	Q.8	-1.826.41	Perizinan Penanaman Modal Dalam Negeri
		9 Izin Pembukaan Kantor Cabang Penanaman Modal Dalam Negeri/Penanaman Modal Asing	Q.9	-1.826.41	Perizinan Penanaman Modal Dalam Negeri
		10 Izin Penutupan Kantor Cabang Penanaman Modal Dalam Negeri/Penanaman Modal Asing	Q.10	-1.826.41	Perizinan Penanaman Modal Dalam Negeri

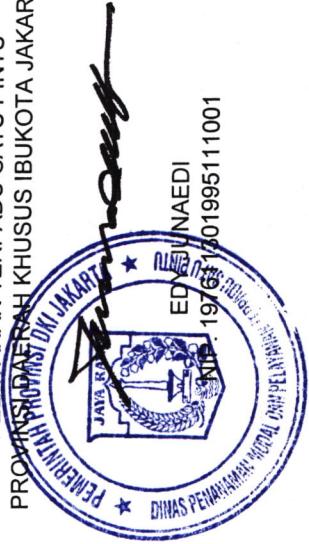
BIDANG	NO	JENIS IZIN/NON IZIN	KODE IZIN/ NON IZIN	KODE KLASIFIKASI ARSIP	KLASIFIKASI ARSIP
R dan Kepemudaan Keolahragaan	1	Izin Penyeleenggaraan Kegiatan Keolahragaan dan Kepemudaan	R.1	-1.857.91	Perizinan Bidang Olah Raga
	2	Izin Operasional Prasarana dan Sarana Olahraga (Edukasi/ Prestasi/ Rekreasi)	R.2	-1.857.91	Perizinan Bidang Olah Raga
S Statistik;					
T Persandian;					
U Kebudayaan;					
V Perpustakaan;					
W Kearsipan					
X Kelautan dan Perikanan	1	Izin Penangkapan Ikan 5-30 GT	X.1	-1.823.67	Perizinan Perikanan
	2	Rekomendasi Surat Izin Penangkapan Ikan > 30 GT	X.2	-1.823.67	Perizinan Perikanan
	3	Izin Kapal Pengangkut Ikan < 30 GT	X.3	-1.823.67	Perizinan Perikanan
	4	Izin Penangkapan Ikan Andon	X.4	-1.823.67	Perizinan Perikanan
	5	Tanda Daftar Usaha Perikanan (TDUP)	X.5	-1.823.67	Perizinan Perikanan
	6	Izin Usaha Perikanan Budidaya	X.6	-1.823.67	Perizinan Perikanan
	7	Izin Usaha Penangkapan Ikan < 30 GT	X.7	-1.823.67	Perizinan Perikanan
	8	Rekomendasi Impor Bidang Perikanan			
	-	Rekomendasi Impor Ikan Hias dan Tanaman Air	X.8a	-1.823.67	Perizinan Perikanan
	-	Rekomendasi Impor Hasil Perikanan	X.8b	-1.823.67	Perizinan Perikanan
	-	Rekomendasi Impor Benih Ikan	X.8c	-1.823.67	Perizinan Perikanan
	-	Rekomendasi Impor Pakan dan Obat Ikan	X.8d	-1.823.67	Perizinan Perikanan
	-	Rekomendasi Impor Induk Ikan	X.8e	-1.823.67	Perizinan Perikanan
	-	Rekomendasi Impor Ikan Hidup	X.8f	-1.823.67	Perizinan Perikanan
	9	Tanda Pencatatan Kapal Penangkap Ikan <5 GT	X.9	-1.823.67	Perizinan Perikanan
	10	Rekomendasi Izin Kapal Pengangkut Ikan >30 GT	X.10	-1.823.67	Perizinan Perikanan
Y Pariwisata	1	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	Y.1	-1.858.8	Perizinan Bidang Pariwisata
	2	Tanda Daftar Pertunjukan Temporer	Y.2	-1.858.8	Perizinan Bidang Pariwisata
	3	Rekomendasi Penyelegenggaraan Perjalanan Haji dan Umrah	Y.3	-1.858.8	Perizinan Bidang Pariwisata

BIDANG	NO	JENIS IZIN/NON IZIN	KODE IZIN NON IZIN	KODE KLASIFIKASI ARSIP	KLASIFIKASI ARSIP
Z Pertanian	1	Izin Praktik Dokter Hewan	Z.1	-1.823.58	Perizinan Bidang Peternakan
	2	Izin Usaha Klinik Hewan	Z.2	-1.823.58	Perizinan Bidang Peternakan
	3	Izin Distributor Obat Hewan	Z.3	-1.823.58	Perizinan Bidang Peternakan
	4	Rekomendasi Izin Usaha sebagai Importir, Produsen dan Eksportir Obat Hewan	Z.4	-1.823.58	Perizinan Bidang Peternakan
	5	Izin Tempat Sementara Penampungan Hewan	Z.5	-1.823.58	Perizinan Bidang Peternakan
	6	Rekomendasi Instalasi Karantina Hewan/Produk Hewan/ Pakan Hewan Sementara	Z.6	-1.823.58	Perizinan Bidang Peternakan
	7	Izin Pemasukan Termak	Z.7	-1.823.58	Perizinan Bidang Peternakan
	8	Rekomendasi Pemasukan /Pengeluaran Hewan	Z.8	-1.823.58	Perizinan Bidang Peternakan
	9	Izin Pemasukan/Pengeluaran hewan dan produk hewan (domestik)	Z.9	-1.823.58	Perizinan Bidang Peternakan
	10	Izin Depo / Toko Obat Hewan	Z.10	-1.823.58	Perizinan Bidang Peternakan
	11	Izin Petshop	Z.11	-1.823.58	Perizinan Bidang Peternakan
	12	Izin Distributor Daging	Z.12	-1.823.58	Perizinan Bidang Peternakan
	13	Izin Toko Daging/ Swalayan yang menjual daging	Z.13	-1.823.58	Perizinan Bidang Peternakan
	14	Izin Usaha Pengolahan Daging	Z.14	-1.823.58	Perizinan Bidang Peternakan
	15	Izin Pengangkutan Daging	Z.15	-1.823.58	Perizinan Bidang Peternakan
	16	Kartu Tanda Berjualan Daging	Z.16	-1.823.58	Perizinan Bidang Peternakan
	17	Izin Usaha Pemotongan Termak	Z.17	-1.823.58	Perizinan Bidang Peternakan
	18	Izin Usaha Persusuan	Z.18	-1.823.58	Perizinan Bidang Peternakan
	19	Rekomendasi Impor.	Z.19	-1.823.58	Perizinan Bidang Peternakan
	20	Rekomendasi Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Z.20	-1.823.58	Perizinan Bidang Peternakan
	21	Rekomendasi Usaha Pengolahan Tulang dan Bulu Ayam	Z.21	-1.823.58	Perizinan Bidang Peternakan
	22	Izin Distributor Pakan Hewan Kesayangan	Z.22	-1.823.58	Perizinan Bidang Peternakan
AA Kehutanan	1	Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan (Kayu /Bukan Kayu)	AA.1	-1.823.27	Perizinan Bidang Kehutanan
	2	Industri Pengolahan Kayu (Lanjutan/Terpadu)	AA.2	-1.823.27	Perizinan Bidang Kehutanan
	3	Tempat Penampungan Terdaftar	AA.3	-1.823.27	Perizinan Bidang Kehutanan
	4	Izin Pengedar/Penampung Tumbuhan dan Satwa Liar Yang Tidak Dilindungi dan Non Appendix CITES	AA.4	-1.823.27	Perizinan Bidang Kehutanan
	5	Rekomendasi Izin Lembaga Konservasi	AA.5	-1.823.27	Perizinan Bidang Kehutanan
	6	Rekomendasi Izin Penggunaan Kawasan Hutan	AA.6	-1.823.27	Perizinan Bidang Kehutanan
	7	Rekomendasi Calon Lahan Kompensasi Penggunaan Kawasan Hutan	AA.7	-1.823.27	Perizinan Bidang Kehutanan
	8	Rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Pembangunan Fasilitas Umum Non Komersial	AA.8	-1.823.27	Perizinan Bidang Kehutanan

BIDANG	NO	JENIS IZIN/NON IZIN	KODE IZIN/ NON IZIN	KODE KLASIFIKASI ARSIP	KLASIFIKASI ARSIP
AB Energi dan Sumber Daya Mineral	1	Izin Operasional Penyediaan Tenaga Listrik	AB.1	-1.824.15	Energi dan Bahan Bakar
	2	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	AB.2	-1.824.15	Energi dan Bahan Bakar
	3	Tanda Daftar Penyediaan Tenaga Listrik	AB.3	-1.824.15	Energi dan Bahan Bakar
	4	Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik	AB.4	-1.824.15	Energi dan Bahan Bakar
AC Perdagangan	1	Surat Izin Usaha Perdagangan	AC.1	-1.824.27	Perizinan Bidang Perdagangan dan Perpasaran
	2	Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol untuk Pengecer, Penjual Langsung dan TBB Sebagai Pengecer	AC.2	-1.824.27	Perizinan Bidang Perdagangan dan Perpasaran
	3	Tanda Daftar Perusahaan	AC.3	-1.824.27	Perizinan Bidang Perdagangan dan Perpasaran
	4	Tanda Daftar Gudang	AC.4	-1.824.27	Perizinan Bidang Perdagangan dan Perpasaran
	5	Angka Pengenal Importir	AC.5	-1.824.27	Perizinan Bidang Perdagangan dan Perpasaran
	6	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba untuk Pemberi Varalaba (Baru/Lanjutan)	AC.6	-1.824.27	Perizinan Bidang Perdagangan dan Perpasaran
	7	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba untuk Penerima Waralaba (Baru/Lanjutan)	AC.7	-1.824.27	Perizinan Bidang Perdagangan dan Perpasaran
	8	Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS)	AC.8	-1.824.27	Perizinan Bidang Perdagangan dan Perpasaran
	9	Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)	AC.9	-1.824.27	Perizinan Bidang Perdagangan dan Perpasaran
	10	Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat Untuk Pengelolaan Pasar Tradisional	AC.10	-1.824.27	Perizinan Bidang Perdagangan dan Perpasaran
	11	Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Sebagai Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya (PT-B2)	AC.11	-1.824.27	Perizinan Bidang Perdagangan dan Perpasaran
	12	Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Sebagai Distributor Terdaftar (DT-B2)	AC.12	-1.824.27	Perizinan Bidang Perdagangan dan Perpasaran
	13	Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Untuk Distributor	AC.13	-1.824.27	Perizinan Bidang Perdagangan dan Perpasaran
AD Perindustrian	1	Izin Usaha Industri	AD.1	-1.824.18	Perizinan Bidang Perindustrian
	2	Persetujuan Prinsip Industri untuk Industri di Luar Kawasan	AD.2	-1.824.18	Perizinan Bidang Perindustrian

BIDANG	NO	JENIS IZIN/NON IZIN	KODE IZIN/ NON IZIN	KODE KLASIFIKASI ARSIP	KLASIFIKASI ARSIP
	3	Izin Usaha Kawasan Industri	AD.3	-1.824.18	Perizinan Bidang Perindustrian
	4	Izin Perluasan Kawasan Industri	AD.4	-1.824.18	Perizinan Bidang Perindustrian
AE TRANSMIGRASI					
Kesatuan AF Bangsa dan Politik Dalam Negeri	1	Rekomendasi Penelitian	AF.1	-1.862.9	Perizinan Bidang Pembinaan Kesatuan Bangsa
Pelayanan AG Adminitrasi	1	Pelayanan Administrasi PTSP Kecamatan	AG.1	-071.561	Pelayanan Masyarakat Pemerintahan Kelurahan
	2	Pelayanan Administrasi PTSP Kelurahan	AG.2	-071.562	Pelayanan Masyarakat Pemerintahan Kecamatan

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DRAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**



197611301995111001

Lampiran III : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
 Nomor : 106 TAHUN 2017
 Tanggal : 26 Juli 2017

KODE WILAYAH PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

NO	PROVINSI DPMPTSP	KOTA/KAB ADMINISTRASI		KECAMATAN		KELURAHAN	
		Kode Perizinan dan Non Perizinan	Unit Pelaksana PTSP Kota	Kode Perizinan dan Non Perizinan	Unit Pelaksana PTSP Kecamatan	Kode Perizinan dan Non Perizinan	Unit Pelaksana PTSP Kelurahan
	Provinsi DKI Jakarta	31	1 Jakarta Pusat	31.71	1 Gambir	31.71.01	1 Gambir 2 Cideng 3 Petojo Utara 4 Petojo Selatan 5 Kebon Kelapa 6 Duri Pulo
				2 Sawah Besar	31.71.02	1 Pasar Baru 2 Karang Anyar 3 Kartini 4 Gunung Sahari Utara 5 Mangga Dua Selatan	31.71.02.1001 31.71.02.1002 31.71.02.1003 31.71.02.1004 31.71.02.1005
				3 Kemayoran	31.71.03	1 Kemayoran 2 Kebon Kosong 3 Harapan Mulia 4 Serdang 5 Gunung Sahari Selatan 6 Cempaka Baru 7 Sumur Batu 8 Utan Panjang	31.71.03.1001 31.71.03.1002 31.71.03.1003 31.71.03.1004 31.71.03.1005 31.71.03.1006 31.71.03.1007 31.71.03.1008

NO	PROVINSI		KOTA/KAB ADMINISTRASI		KECAMATAN		KELURAHAN	
	DPMPTSP	Kode Perizinan dan Non Perizinan	Unit Pelaksana PTSP Kota	Kode Perizinan dan Non Perizinan	Unit Pelaksana PTSP Kecamatan	Kode Perizinan dan Non Perizinan	Unit Pelaksana PTSP Kelurahan	Kode Perizinan dan Non Perizinan
					4 Senen	31.71.04	1 Senen	31.71.04.1001
							2 Konori	31.71.04.1002
							3 Paseban	31.71.04.1003
							4 Kramat	31.71.04.1004
							5 Kwitang	31.71.04.1005
							6 Bungur	31.71.04.1006
5	Cempaka Putih	31.71.05	1 Cempaka Putih Timur	31.71.05.1001				
			2 Cempaka Putih Barat	31.71.05.1002				
			3 Rawasari	31.71.05.1003				
6	Menteng	31.71.06	1 Menteng	31.71.06.1001				
			2 Pegangsaan	31.71.06.1002				
			3 Cikini	31.71.06.1003				
			4 Gondangdia	31.71.06.1004				
			5 Kebon Sirih	31.71.06.1005				
7	Tanah Abang	31.71.07	1 Gelora	31.71.07.1001				
			2 Bendungan Hilir	31.71.07.1002				
			3 Karet Tengsin	31.71.07.1003				
			4 Petamburan	31.71.07.1004				
			5 Kebon Melati	31.71.07.1005				
			6 Kebon Kacang	31.71.07.1006				
			7 Kampung Bali	31.71.07.1007				
8	Johar Baru	31.71.08	1 Johar Baru	31.71.08.1001				
			2 Kampung Rawa	31.71.08.1002				
			3 Galur	31.71.08.1003				
			4 Tanah Tinggi	31.71.08.1004				

NO	PROVINSI		KOTA/KAB ADMINISTRASI		KECAMATAN		KELURAHAN	
	DPMPTSP	Kode Perizinan dan Non Perizinan	Unit Pelaksana PTSP Kota	Kode Perizinan dan Non Perizinan	Unit Pelaksana PTSP Kecamatan	Kode Perizinan dan Non Perizinan	Unit Pelaksana PTSP Kelurahan	Kode Perizinan dan Non Perizinan
			2 Jakarta Utara	31.72	1 Penjaringan	31.72.01	1 Penjaringan	31.72.01.1001
							2 Kamal Muara	31.72.01.1002
							3 Kapuk Muara	31.72.01.1003
							4 Pejagalan	31.72.01.1004
							5 Pluit	31.72.01.1005
							1 Tanjung Priok	31.72.02.1001
			2 Tanjung Priok	31.72.02			2 Sunter Jaya	31.72.02.1002
							3 Papanggo	31.72.02.1003
							4 Sungai Bambu	31.72.02.1004
							5 Kebon Bawang	31.72.02.1005
							6 Sunter Agung	31.72.02.1006
							7 Warakas	31.72.02.1007
							1 Koja	31.72.03.1001
							2 Tugu Utara	31.72.03.1002
							3 Lagoa	31.72.03.1003
							4 Rawa Badak Utara	31.72.03.1004
							5 Tugu Selatan	31.72.03.1005
							6 Rawa Badak Selatan	31.72.03.1006
							1 Cilincing	31.72.04.1001
			4 Cilincing	31.72.04			2 Sukapura	31.72.04.1002
							3 Marunda	31.72.04.1003
							4 Kali Baru	31.72.04.1004
							5 Semper Timur	31.72.04.1005
							6 Rorotan	31.72.04.1006
							7 Semper Barat	31.72.04.1007
						31.72.05	1 Pademangan Timur	31.72.05.1001
							2 Pademangan Barat	31.72.05.1002
							3 Ancol	31.72.05.1003

NO	PROVINSI		KOTA/KAB ADMINISTRASI		KECAMATAN		KELURAHAN	
	DPMPTSP	Kode Perizinan dan Non Perizinan	Unit Pelaksana PTSP Kota	Kode Perizinan dan Non Perizinan	Unit Pelaksana PTSP Kecamatan	Kode Perizinan dan Non Perizinan	Unit Pelaksana PTSP Kelurahan	Kode Perizinan dan Non Perizinan
3	Jakarta Barat				6 Kelapa Gading	31.72.06	1 Kelapa Gading Timur 2 Pegangsaan Dua 3 Kelapa Gading Barat	31.72.06.1001 31.72.06.1002 31.72.06.1003
31.73	1 Cengkareng				31.73.01	1 Cengkareng Barat 2 Duri Kosambi 3 Rawa Buaya 4 Kedaung Kali Angke 5 Kapuk 6 Cengkareng Timur	31.73.01.1001 31.73.01.1002 31.73.01.1003 31.73.01.1004 31.73.01.1005 31.73.01.1006	
2	Grogol Petamburan				31.73.02	1 Grogol 2 Tanjung Duren Utara 3 Tomang 4 Jelambar 5 Tanjung Duren Selatan 6 Jelambar Baru 7 Wijaya Kusuma	31.73.02.1001 31.73.02.1002 31.73.02.1003 31.73.02.1004 31.73.02.1005 31.73.02.1006 31.73.02.1007	
3	Taman Sari				31.73.03	1 Taman Sari 2 Krukut 3 Maphar 4 Tangki 5 Mangga Besar 6 Keagungan 7 Glodok 8 Pinangsia	31.73.03.1001 31.73.03.1002 31.73.03.1003 31.73.03.1004 31.73.03.1005 31.73.03.1006 31.73.03.1007 31.73.03.1008	
4	Tambora				31.73.04	1 Tambora 2 Kali anyar 3 Duri Utara 4 Tanah Sereal	31.73.04.1001 31.73.04.1002 31.73.04.1003 31.73.04.1004	

NO	PROVINSI		KOTA/KAB ADMINISTRASI		KECAMATAN		KELURAHAN	
	DPMPTSP	Kode Perizinan dan Non Perizinan	Unit Pelaksana PTSP Kota	Kode Perizinan dan Non Perizinan	Unit Pelaksana PTSP Kecamatan	Kode Perizinan dan Non Perizinan	Unit Pelaksana PTSP Kelurahan	Kode Perizinan dan Non Perizinan
5	Kebon Jeruk	31.73.05	1	Kebon Jeruk	31.73.05.1001	1	Kebon Jeruk	31.73.04.1005
			2	Sukabumi Utara	31.73.05.1002	2	Jembatan Besi	31.73.04.1006
			3	Sukabumi Selatan	31.73.05.1003	3	Jembatan Angke	31.73.04.1007
			4	Kelapa Dua	31.73.05.1004	4	Jembatan Lima	31.73.04.1008
			5	Duri Kepa	31.73.05.1005	5	Pekojan	31.73.04.1009
			6	Kedoya Utara	31.73.05.1006	6	Roa Malaka	31.73.04.1010
			7	Kedoya Selatan	31.73.05.1007	7	Duri Selatan	31.73.04.1011
6	Kalideres	31.73.06	1	Kalideres	31.73.06.1001	1	Palmerah	31.73.07.1001
			2	Semanan	31.73.06.1002	2	Slipi	31.73.07.1002
			3	Tegal Alur	31.73.06.1003	3	Kota Bambu Utara	31.73.07.1003
			4	Kamal	31.73.06.1004	4	Jati Puto	31.73.07.1004
			5	Pegadungan	31.73.06.1005	5	Kemanggisan	31.73.07.1005
7	Palmerah	31.73.07	1	Palmerah	31.73.07.1006	6	Kota Bambu Selatan	31.73.07.1006

NO	PROVINSI		KOTA/KAB ADMINISTRASI		KECAMATAN		KELURAHAN	
	DPMPTSP	Kode Perizinan dan Non Perizinan	Unit Pelaksana PTSP Kota	Kode Perizinan dan Non Perizinan	Unit Pelaksana PTSP Kecamatan	Kode Perizinan dan Non Perizinan	Unit Pelaksana PTSP Kelurahan	Kode Perizinan dan Non Perizinan
1	31.74.01	Jakarta Selatan	31.74	1 Tebet	31.74.01	1 Tebet Timur 2 Tebet Barat 3 Menteng Dalam 4 Kebon Baru 5 Bukit Duri 6 Manggarai Selatan 7 Manggarai	1 Kembaran Utara 2 Meruya Utara 3 Meruya Selatan 4 Srengseng 5 Jollo 6 Kembaran Selatan	31.73.08.1001 31.73.08.1002 31.73.08.1003 31.73.08.1004 31.73.08.1005 31.73.08.1006
2	31.74.02	Setiabudi			31.74.02	1 Setiabudi 2 Karet Semanggi 3 Karet Kuningan 4 Karet 5 Menteng Atas 6 Pasar Manggis 7 Guntur 8 Kuningan Timur	1 Setiabudi 2 Karet Semanggi 3 Karet Kuningan 4 Karet 5 Menteng Atas 6 Pasar Manggis 7 Guntur 8 Kuningan Timur	31.74.02.1001 31.74.02.1002 31.74.02.1003 31.74.02.1004 31.74.02.1005 31.74.02.1006 31.74.02.1007 31.74.02.1008
3	31.74.03	Mampang Prapatan	31.74	1 Mampang Prapatan 2 Bangka 3 Pela Mampang 4 Tegal Parang 5 Kuningan Barat	31.74.03	1 Mampang Prapatan 2 Bangka 3 Pela Mampang 4 Tegal Parang 5 Kuningan Barat	31.74.03.1001 31.74.03.1002 31.74.03.1003 31.74.03.1004 31.74.03.1005	
4	31.74.04	Pasar Minggu				1 Pasar Minggu 2 Jati Padang 3 Cilandak Timur 4 Ragunan		31.74.04.1001 31.74.04.1002 31.74.04.1003 31.74.04.1004

NO	PROVINSI		KOTA/KAB ADMINISTRASI		KECAMATAN		KELURAHAN	
	DPMPTSP	Kode Perizinan dan Non Perizinan	Unit Pelaksana PTSP Kota	Unit Pelaksana PTSP Kecamatan	Kode Perizinan dan Non Perizinan	Unit Pelaksana PTSP Kelurahan	Kode Perizinan dan Non Perizinan	
5						5 Pejaten Timur 6 Pejaten Barat 7 Kebagusan	31.74.04.1005 31.74.04.1006 31.74.04.1007	
5	Kebayoran Lama				31.74.05	1 Kebayoran Lama Utara 2 Pondok Pinang 3 Cipulir 4 Grogol Utara 5 Grogol Selatan 6 Kebayoran Lama Selatan	31.74.05.1001 31.74.05.1002 31.74.05.1003 31.74.05.1004 31.74.05.1005 31.74.05.1006	
6	Cilandak				31.74.06	1 Cilandak Barat 2 Lebak Bulus 3 Pondok Labu 4 Gandaria Selatan 5 Cipete Selatan	31.74.06.1001 31.74.06.1002 31.74.06.1003 31.74.06.1004 31.74.06.1005	
7	Kebayoran Baru				31.74.07	1 Melawai 2 Gunung 3 Kramat Pela 4 Selong 5 Rawa Barat 6 Senayan 7 Pulo 8 Petogogan 9 Gandaria Utara 10 Cipete Utara	31.74.07.1001 31.74.07.1002 31.74.07.1003 31.74.07.1004 31.74.07.1005 31.74.07.1006 31.74.07.1007 31.74.07.1008 31.74.07.1009 31.74.07.1010	
8	Pancoran				31.74.08	1 Pancoran 2 Kalibata 3 Rawa Jati 4 Duren Tiga 5 Pengadegan 6 Cikoko	31.74.08.1001 31.74.08.1002 31.74.08.1003 31.74.08.1004 31.74.08.1005 31.74.08.1006	

NO	PROVINSI		KOTA/KAB ADMINISTRASI		KECAMATAN		KELURAHAN	
	DPMPTSP	Kode Perizinan dan Non Perizinan	Unit Pelaksana PTSP Kota	Kode Perizinan dan Non Perizinan	Unit Pelaksana PTSP Kecamatan	Kode Perizinan dan Non Perizinan	Unit Pelaksana PTSP Kelurahan	Kode Perizinan dan Non Perizinan
					9 Jagakarsa	31.74.09	1 Jagakarsa 2 Srengseng Sawah 3 Ciganjur 4 Lenteng Agung 5 Tanjung Barat 6 Cipedak	31.74.09.1001 31.74.09.1002 31.74.09.1003 31.74.09.1004 31.74.09.1005 31.74.09.1006
10	Pesanggrahan				31.74.10		1 Pesanggrahan 2 Bintaro 3 Petukangan Utara 4 Petukangan Selatan 5 Ulujami	31.74.10.1001 31.74.10.1002 31.74.10.1003 31.74.10.1004 31.74.10.1005
5	Jakarta Timur	31.75	1 Matraman		31.75.01		1 Pisangan Baru 2 Utan Kayu Utara 3 Kayu Manis 4 Palmeriam 5 Kebon Manggis 6 Utan Kayu Selatan	31.75.01.1001 31.75.01.1002 31.75.01.1003 31.75.01.1004 31.75.01.1005 31.75.01.1006
					31.75.02		1 Pulo Gadung 2 Pisangan Timur 3 Cipinang 4 Jatinegara Kaum 5 Rawamangun 6 Kayu Putih 7 Jati	31.75.02.1001 31.75.02.1002 31.75.02.1003 31.75.02.1004 31.75.02.1005 31.75.02.1006 31.75.02.1007
3	Jatinegara	31.75.03					1 Kampung Melayu 2 Bidara Cina 3 Bali Meester 4 Rawa Bunga 5 Cipinang Cempedak	31.75.03.1001 31.75.03.1002 31.75.03.1003 31.75.03.1004 31.75.03.1005

NO	PROVINSI		KOTA/KAB ADMINISTRASI		KECAMATAN		KELURAHAN	
	DPMPTSP	Kode Perizinan dan Non Perizinan	Unit Pelaksana PTSP Kota	Kode Perizinan dan Non Perizinan	Unit Pelaksana PTSP Kecamatan	Kode Perizinan dan Non Perizinan	Unit Pelaksana PTSP Kelurahan	Kode Perizinan dan Non Perizinan
1					31.75.04	6 Cipinang Muara 7 Cipinang Besar Selatan 8 Cipinang Besar Utara	31.75.03.1006 31.75.03.1007 31.75.03.1008	31.75.03.1006 31.75.03.1007 31.75.03.1008
2			4 Kramat Jati		31.75.04	1 Kramatjati 2 Kampung Tengah 3 Dukuh	31.75.04.1001 31.75.04.1002 31.75.04.1003	31.75.04.1001 31.75.04.1002 31.75.04.1003
3						4 Batu Ampar 5 Balekambang 6 Cilitan 7 Cawang	31.75.04.1004 31.75.04.1005 31.75.04.1006 31.75.04.1007	31.75.04.1004 31.75.04.1005 31.75.04.1006 31.75.04.1007
4					31.75.05	1 Gedong 2 Baru 3 Cijantung 4 Kalisari	31.75.05.1001 31.75.05.1002 31.75.05.1003	31.75.05.1001 31.75.05.1002 31.75.05.1003
5						5 Pasar Rebo	31.75.05.1004 31.75.05.1005	31.75.05.1004 31.75.05.1005
6					31.75.06	1 Cakung	31.75.06.1001 31.75.06.1002 31.75.06.1003 31.75.06.1004 31.75.06.1005 31.75.06.1006 31.75.06.1007	31.75.06.1001 31.75.06.1002 31.75.06.1003 31.75.06.1004 31.75.06.1005 31.75.06.1006 31.75.06.1007
7					31.75.07	7 Duren Sawit	1 Duren Sawit 2 Pondok Bambu 3 Klender 4 Pondok Kelapa 5 Malaka Sari 6 Malaka Jaya 7 Pondok Kopi	31.75.07.1001 31.75.07.1002 31.75.07.1003 31.75.07.1004 31.75.07.1005 31.75.07.1006 31.75.07.1007

NO	PROVINSI		KOTA/KAB ADMINISTRASI		KECAMATAN		KELURAHAN	
	DPMPTSP	Kode Perizinan dan Non Perizinan	Unit Pelaksana PTSP Kota	Kode Perizinan dan Non Perizinan	Unit Pelaksana PTSP Kecamatan	Kode Perizinan dan Non Perizinan	Unit Pelaksana PTSP Kelurahan	Kode Perizinan dan Non Perizinan
8	Makasar	31.75.08	1	Makasar	1	1	31.75.08.1001	31.75.08.1001
9	Ciracas	31.75.09	2	Pinangrantii	2	2	31.75.08.1002	31.75.08.1002
10	Cipayung	31.75.10	3	Kebon Pala	3	3	31.75.08.1003	31.75.08.1003
6	Kab.Adm.Kep.Seribu	31.01	4	Halim Perdana Kusuma	4	4	31.75.08.1004	31.75.08.1004
1	Kepulauan Seribu Utara	31.01.01	5	Cipinang Melayu	5	5	31.75.08.1005	31.75.08.1005
2	Kepulauan Seribu Selatan	31.01.02	1	Ciracas	1	1	31.75.09.1001	31.75.09.1001
			2	Cibubur	2	2	31.75.09.1002	31.75.09.1002
			3	Kelapa Dua Wetan	3	3	31.75.09.1003	31.75.09.1003
			4	Susukan	4	4	31.75.09.1004	31.75.09.1004
			5	Rambutan	5	5	31.75.09.1005	31.75.09.1005
			1	Cipayung	1	1	31.75.10.1001	31.75.10.1001
			2	Cilangkap	2	2	31.75.10.1002	31.75.10.1002
			3	Pondok Ranggon	3	3	31.75.10.1003	31.75.10.1003
			4	Munjul	4	4	31.75.10.1004	31.75.10.1004
			5	Setu	5	5	31.75.10.1005	31.75.10.1005
			6	Bambu Apus	6	6	31.75.10.1006	31.75.10.1006
			7	Lubang Buaya	7	7	31.75.10.1007	31.75.10.1007
			8	Ceger	8	8	31.75.10.1008	31.75.10.1008
			1	Pulau Panggang	1	1	31.01.01.1001	31.01.01.1001
			2	Pulau Kelapa	2	2	31.01.01.1002	31.01.01.1002
			3	Pulau Harapan	3	3	31.01.01.1003	31.01.01.1003
			1	Pulau Untung Jawa	1	1	31.01.02.1001	31.01.02.1001
			2	Pulau Tidung	2	2	31.01.02.1002	31.01.02.1002
			3	Pulau Pari	3	3	31.01.02.1003	31.01.02.1003

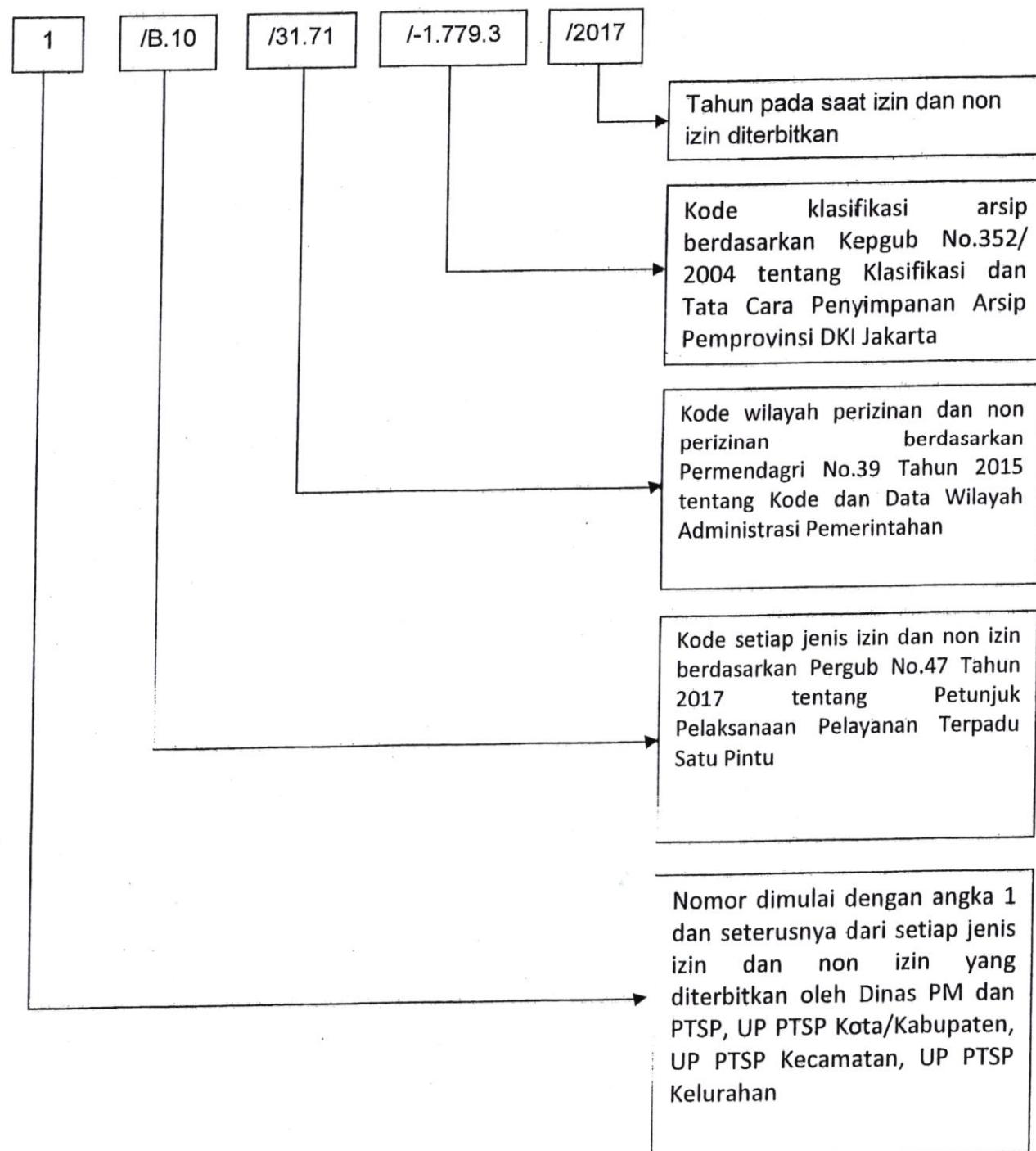
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA BARAT KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Lampiran IV : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : 106 TAHUN 2017
Tanggal : 26 JULI 2017

Contoh:

Penomoran "Izin Penyelenggaraan Klinik Pelayanan Hemodialisis" yang diterbitkan oleh
Kepala Unit Pelaksana PTSP Kota Administrasi Jakarta Pusat



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DKI JAKARTA



EDY JUNAEDI
NIP 197611301995111001

Lampiran V : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : 106 TAHUN 2017
Tanggal : 26 JULI 2017

Contoh:

Penomoran "Perpanjangan Surat Izin Praktik Apoteker"
yang diterbitkan oleh Kepala Unit Pelaksana PTSP Kecamatan Sawah Besar.

